

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) memiliki 3 (tiga) landasan utama yaitu : transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Akuntabilitas dalam hal ini merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kewajiban organisasi dalam rangka akuntabilitas diatas, maka Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan tugas pokok perlu menyusun Laporan Kinerja di akhir tahun pelaksanaan kinerja selama Tahun 2015 sesuai dengan program/kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahun (RKT) 2015, sehingga Laporan Kinerja merupakan sarana pengukuran dan evaluasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur sebagai tolok ukur dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat di bidang komunikasi dan informatika

Di dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur disebutkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur sesuai tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Komunikasi dan Informatika.

Agar mencapai hasil (*outcome*) yang optimal, maka program kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika yang telah dianggarkan melalui APBD/P-APBD tahun 2015 sesuai visi dan misi, tujuan, sasaran, indikator dan tolok ukur kinerja kegiatan serta rencana tingkat capaian program kegiatan (*target kinerja*) dapat terlaksana dengan baik sesuai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur tahun 2014 s/d 2019.

1.2 LANDASAN HUKUM

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur tahun 2013 disusun dengan landasan hukum :

- 1.2.1 Peraturan Pemerintah Nomor : 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- 1.2.2 Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
- 1.2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
- 1.2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- 1.2.5 Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 1.2.6 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 1.2.7 Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.3 TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur selama tahun 2015.

Hasilnya diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan evaluasi dan acuan dalam menyusun program di tahun berikutnya, sehingga program di tahun mendatang dapat disusun dengan fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

1.4 GAMBARAN UMUM DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TIMUR

Tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur sesuai Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagai berikut :

1.4.1 Tugas

Sesuai Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 dalam bab VII bagian ke satu pasal 11 ayat (2) disebutkan bahwa : ***“Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Komunikasi dan Informatika”***.

1.4.2 Fungsi

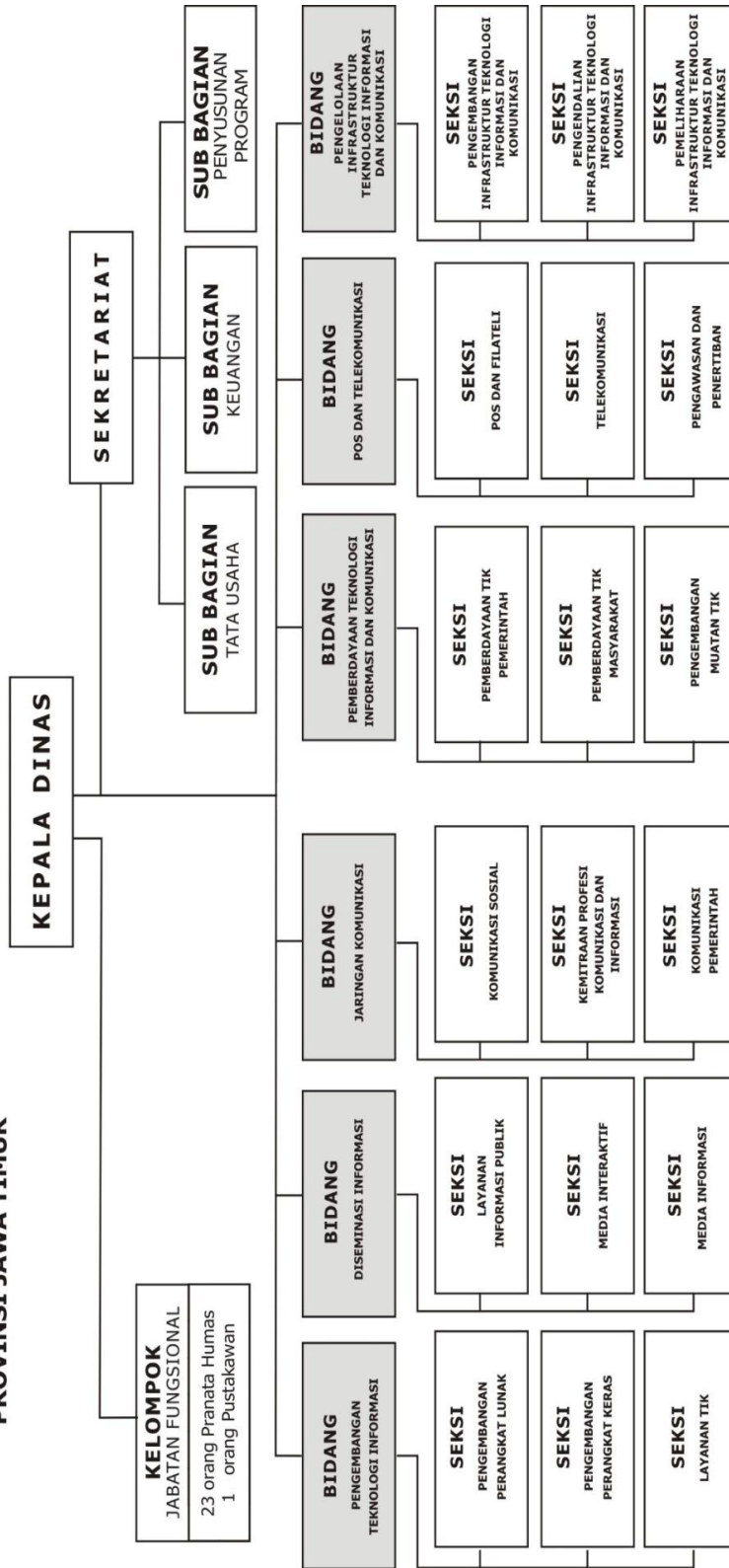
Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Komunikasi dan Informatika;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Komunikasi dan Informatika;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur.

1.4.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor : 83 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Seksi/Subbag Dinas Kominfo Provinsi Jatim sesuai Struktur Organisasi dan tata kerja (SOTK) terdiri dari 1 unit eselon II, 7 unit eselon III yang terdiri dari 1 sekretariat dan 6 bidang serta Kelompok Jabatan Fungsional dengan bagan organisasi sebagai berikut :

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TIMUR**



Tugas pokok masing-masing unit kerja sesuai Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor : 83 Tahun 2008 adalah sebagai berikut :

- (1) Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan;
- (2) Bidang Pengembangan Teknologi Informatika mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pengendalian serta pemeliharaan sarana prasarana Teknologi Informatika.
- (3) Bidang Diseminasi dan Informasi, mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan di bidang diseminasi/penyebarluasan informasi ;
- (4) Bidang Jaringan Komunikasi mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan kerjasama jaringan komunikasi antar lembaga komunikasi dan informasi.
- (5) Bidang Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melakukan pemberdayaan telematika pemerintahan, masyarakat dan pengembangan muatan telematika.
- (6) Bidang Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban serta evaluasi kegiatan pelayanan usaha jasa pos dan telekomunikasi khusus serta standarisasi alat peralatan pos dan telekomunikasi.
- (7) Bidang Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pengendalian dan pemeliharaan Infrastruktur jaringan Teknologi Informasi dan komunikasi

1.5 ASPEK STRATEGIS

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan pembangunan di bidang komunikasi dan informatika memiliki aspek strategis yaitu menyediakan dan menyebarluaskan informasi pemerintahan dan pembangunan yang bermanfaat. Selain itu, pemberdayaan informasi yang dilakukan oleh Dinas Kominfo Prov. Jatim sesuai fungsi yakni sebagai produsen dan penyedia informasi. Informasi yang dihimpun, diolah dan

disediakan dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhannya, baik melalui cetak, elektronik maupun media luar ruang.

Peran Dinas Kominfo di dalam memberikan layanan informasi dan pemberdayaan masyarakat juga memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam rangka mempercepat proses layanan masyarakat sesuai dengan kemampuan dalam pemanfaatan TIK melalui pembangunan infrastruktur TIK di daerah dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan penyebaran informasi dan pemberdayaan kepada masyarakat di Jawa Timur.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, antara lain :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Komunikasi dan Informatika;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Komunikasi dan Informatika sebagai berikut :
 - a) Penyebarluasan informasi melalui media elektronik, media cetak dan media luar ruang.
 - b) Pemberdayaan masyarakat melalui TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) melalui : pembangunan telecenter di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur dan diadakannya Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang merupakan wahana pemberdayaan lembaga komunikasi masyarakat sebagai agen penyebaran informasi sekaligus sebagai *publik relation* diwilayahnya.
3. Integrasi finger secara online
4. Aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik
5. Pengendalian bandwidth dan pendistribusian SKPD oleh Dinas Kominfo Prov. Jatim.
6. Pembangunan Data Center
7. Dialog interaktif melalui kegiatan Melek IT Gaul Informasi Luar Biasa (Mi-Gila) dalam pelayanan informasi berbasis TIK melalui call center 911.

1.6 KEKUATAN SUMBER DAYA YANG ADA

Jumlah pegawai dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika sebanyak 179 orang dengan rincian sebagai berikut :

➤ Komposisi Status Kepegawaian :

No.	Status Kepegawaian	Jumlah	Prosentase
1	PNS	148 orang	(82%)
2	CPNS	3 orang	(2%)
3	Honorer	28 orang	(16%)
	Jumlah	179 orang	(100%)

➤ Komposisi Jabatan PNS

No.	Jabatan PNS	Jumlah	Prosentase
1	Jabatan Struktural	29 orang	(19%)
2	Jabatan Fungsional Tertentu	22 orang	(15%)
	<i>Pranata Humas Tk. Ahli :</i>		
	Pranata Humas Pertama	0 orang	
	Pranata Humas Muda	2 orang	(1%)
	Pranata Humas Madya	1 orang	(1%)
	<i>Pranata Humas Tk. Terampil :</i>		
	Pranata Humas Penyelia	13 orang	(9%)
	Pranata Humas Pelaksana Lanjutan	3 orang	(2%)
	Pranata Humas Pelaksana	0 orang	
	Pranata Humas Pelaksana Pemula	0 orang	
	Pranata Komputer Muda	3 orang	(2%)
3	Jabatan Fungsional Umum	100 orang	(66%)
	Jumlah	151 orang	(100%)

➤ Komposisi Eselon PNS :

No.	Eselon PNS	Jumlah	Prosentase
1	Eselon II.a	1 orang	(1%)
2	Eselon III.a	7 orang	(5%)
3	Eselon IV.a	21 orang	(14%)
4	Staf	122 orang	(81%)
	Jumlah	151 orang	(100%)

➤ Komposisi Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit dan Golongan Ruang Tahun 2014

NO	URAIAN	GOLONGAN I					GOLONGAN II					GOLONGAN III					GOLONGAN IV					GRAND TOTAL
		a	b	c	d	JML	a	b	c	d	JML	a	b	c	d	JML	a	b	c	d	JML	
1	Kepala Dinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
2	Sekretariat	-	-	-	2	2	1	14	6	3	24	1	16	2	5	24	2	2			4	54
3	Bidang Pengembangan Teknologi Informasi	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	1	5	3	1	10	2	1	-	-	3	15
4	Bidang Diseminasi dan Informasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	6	2	1	-	-	3	9
5	Bidang Jaringan Komunikasi	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	-	2	5	3	1	-	-	4	10
6	Bidang Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	-	-	-	1	1	3	-	1	-	4	1	3	-	3	7	1	1	-	-	2	14
7	Bidang Pos dan Telekomunikasi	-	-	-	-	-	1	2	-	1	4	-	3	1	-	4	5	1	-	-	6	14
8	Bidang Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3	2	3	-	2	7	1	1	-	-	2	12
9	Fungsional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	7	5	20	2	-	-	-	2	22
	Jumlah	-	-	-	3	3	5	20	9	4	38	7	42	13	21	83	18	8	-	1	27	179

➤ Komposisi Pendidikan PNS :

No.	Pendidikan PNS	Jumlah	Prosentase
1	SD	3 orang	(2%)
2	SLTP	7 orang	(5%)
3	SLTA	65 orang	(43%)
4	D III	12 orang	(8%)
5	S 1	32 orang	(21%)
6	S2	32 orang	(21%)
	Jumlah	151 orang	(100%)

➤ Komposisi Pendidikan Pegawai Tidak Tetap (Tenaga Kontrak) :

No.	Pendidikan Pegawai Tidak Tetap	Jumlah	Prosentase
1	SLTA	7 orang	(25%)
2	D III	1 orang	(4%)
3	S 1	20 orang	(71%)
	Jumlah	28 orang	(100%)

➤ Komposisi Umur PNS :

No.	Umur PNS	Jumlah	Prosentase
1	< 25 th	2 orang	(1%)
2	25 – 30 th	7 orang	(5%)
3	31 – 40 th	28 orang	(19%)
4	41 – 50 th	47 orang	(31%)
5	51 – 55	41 orang	(27%)
6	56 – 58	26 orang	(17%)
7	>58	0 orang	(0%)
	Jumlah	151 orang	(100%)

➤ Pegawai Tidak Tetap Dinas Kominfo Prov. Jatim :

No.	Pegawai ditempatkan	Jumlah
1	Sekretariat	11 orang
2	Bidang Diseminasi Informasi	12 orang
3	Bidang Jaringan Komunikasi	4 orang
4	Bidang Infrastruktur	1 orang
	Jumlah	28 orang

1.7 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur selama tahun 2015. Capaian kinerja tahun 2015 diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja tahun 2015 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Adapun sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, menguraikan secara ringkas latar belakang, peran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur serta struktur organisasi.

Bab II – Perencanaan Kinerja, menguraikan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur tahun 2015 meliputi RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2014 – 2019 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2015.

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran

Bab III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015, menguraikan pengukuran kinerja 2014, analisis pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis tahun 2015.

Bab IV – Penutup, menguraikan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur tahun 2015 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Sebagaimana diuraikan dalam Bab VII, bahwa berdasarkan PERDA Provinsi Jawa Timur No. 9 tahun 2008 tanggal 20 Agustus 2008, Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan atas otonomi dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah Provinsi Jawa Timur.

Dalam tugas tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Komunikasi dan Informatika;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Komunikasi dan Informatika;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur.

2.1. RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KINERJA TAHUN 2015

2.1.1 RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

Agenda bidang komunikasi dan informatika sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 adalah **“Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri, dan industrialisasi”** dan **“Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik”**, dengan sub agenda yang terkait langsung dengan Dinas Kominfo Prov. Jatim, antara lain :

- Sub Agenda Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan Peningkatan Pelayanan Publik.
- Sub Agenda Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur.

2.1.2 Rencana Strategis Tahun 2014 – 2019

2.1.2.1 Rencana Strategis

1. V i s i

Visi sebagai salah satu komponen dari Perencanaan Strategis, merupakan gambaran yang dirumuskan tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur.

Adapun Visi Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur adalah :
”Terwujudnya Penyebarluasan Informasi dan Pelayanan Publik melalui TIK di Jawa Timur”

2. M i s i :

Dalam mewujudkan visi tersebut, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan pembangunan di bidang komunikasi dan informatika menyusun misi yang menjadi tanggung jawab organisasinya, sehingga dengan misi ini diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui, mengenal keberadaan dan peran serta instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahannya. Oleh karena itu misi ini ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas layanan informasi, memberdayakan potensi masyarakat serta kerjasama lembaga komunikasi dan informatika.
2. Meningkatkan aplikasi, muatan layanan publik, standarisasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi serta pemanfaatan jaringan TIK dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

- *Misi pertama* ; Meningkatkan kapasitas layanan informasi, memberdayakan potensi masyarakat serta kerjasama lembaga komunikasi dan informatika.

Pada misi ini merupakan suatu harapan untuk dapat meningkatkan kecerdasan, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat melalui penyelenggaraan komunikasi dan informatika dengan melaksanakan suatu kerjasama dan kemitraan media melalui berbagai jumlah media luar ruang, media elektronik dan cetak. Selain itu juga melaksanakan pertunjukan rakyat, pemberdayaan badan koordinasi kehumasan, lembaga konsumen media, dan telecenter serta layanan informasi dan memfasilitasi pengaduan masyarakat.

- *Misi kedua*; Meningkatkan aplikasi, muatan layanan publik, standarisasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi serta pemanfaatan jaringan TIK dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

Pada misi ini merupakan suatu harapan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pemanfaatan TIK, menyediakan hosting dan colocation,, membangun data center dalam rangka meningkatkan pelayanan publik berbasis TIK di era keterbukaan informasi.

3. Tujuan

1. Meningkatkan pengetahuan, kecerdasan, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan komunikasi dan informatika dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik;
2. Meningkatkan layanan, pemanfaatan infrastruktur TIK serta tertib administrasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi.

Tabel 2.1
Matrik Keterkaitan Hubungan antara Misi dan Tujuan

Misi	Tujuan
Meningkatkan kapasitas layanan, memberdayakan potensi masyarakat serta kerjasama lembaga komunikasi dan informatika.	Meningkatkan pengetahuan, kecerdasan, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan komunikasi dan informatika dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik.
Meningkatkan aplikasi, muatan layanan publik, standarisasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi serta pemanfaatan jaringan TIK dalam rangka peningkatan pelayanan publik.	Meningkatkan layanan, pemanfaatan infrastruktur TIK serta tertib administrasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi.

4. Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan Renstra tahun 2014 – 2019, dapat dirumuskan berdasarkan tujuan yang ada, yaitu :

Tujuan-1: Meningkatkan pengetahuan, kecerdasan, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan komunikasi dan informatika dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik. Sasarannya adalah “*meningkatnya diseminasi informasi, dan keterbukaan*”

informasi publik” dan “meningkatnya pemberdayaan masyarakat melalui jaringan komunikasi dan informatika”.

Tujuan-2 : Meningkatkan layanan, pemanfaatan infrastruktur TIK serta tertib administrasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi. Sasarannya adalah *“meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur TIK serta layanan publik” dan “meningkatnya layanan penyelenggaraan pos dan telekomunikasi”.*

5. Indikator Kinerja Utama

Dinas Kominfo Prov. Jatim telah menetapkan Indikator Kinerja (IKU) untuk mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama telah mengacu pada RPJMD dan Renstra Tahun 2014-2019. Adapun Indikator kinerja utama Dinas Kominfo Prov. Jatim yang menjadi acuan untuk periode waktu tahun 2014-2019, sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Jatim

TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	
1.	Meningkatkan pengetahuan, kecerdasan, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan komunikasi dan	Mengurangi masyarakat yang gagap TIK supaya melek informasi	Meningkatnya diseminasi informasi, dan keterbukaan informasi publik	1.	Persentase penurunan pengaduan
				2.	Persentase tindak lanjut sengketa informasi
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	1.	Persentase pemberdayaan masyarakat yang

	informatika dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik.		melalui jaringan komunikasi dan informatika		paham TIK
--	---	--	---	--	-----------

TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	
2.	Meningkatkan layanan, pemanfaatan infrastruktur TIK serta tertib administrasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi.	Membuka akses pelayanan publik melalui pemanfaatan infrastruktur TIK	Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur TIK serta layanan publik	1.	Persentase pemanfaatan hosting dan collocation
				2.	Persentase SKPD, UPT, Lembaga Non Struktural dan Kab/Kota yang memiliki website sesuai standar muatan TIK
				3.	Penilaian Peningkatan e-Government Indonesia (PeGi) Tingkat Provinsi
				1.	Persentase penyelenggaraan pos dan telekomunikasi
			Meningkatnya layanan penyelenggaraan pos dan telekomunikasi		

6. Kebijakan dan Strategi Pencapaian

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan sebagai pedoman atau petunjuk dalam mengembangkan ataupun melaksanakan program/kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah, prioritas pembangunan serta arah kebijakan umum.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Timur tahun 2014 – 2019 telah menetapkan arah kebijakan yang terkait langsung dengan bidang komunikasi dan informatika, dengan arah kebijakan/strategi yaitu :

Mengembangkan konsep reformasi birokrasi sebagai reformasi administrasi yang terdiri dari elemen regulasi, sumber daya manusia, teknologi informasi dan kontrol masyarakat, untuk menghasilkan pelayanan publik yang lebih jelas tolak ukurnya.

7. Program Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur

Strategi pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran serta indikator kinerja utama, Dinas Kominfo Prov. Jatim diimplementasikan melalui 9 program yang didukung 29 kegiatan :

Program prioritas :

- 1) Program Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Program ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat Jawa Timur di bidang TIK antara lain kelompok tani, kelompok pemberdayaan perempuan.

- 2) Program Pengembangan Teknologi Informatika.

Program ini bertujuan untuk mendorong seluruh SKPD Pemerintah Prov. Jatim dan Kabupaten/Kota dalam ketersediaan website untuk memberikan informasi pemerintahan dan pembangunan di Jawa Timur, antara lain implementasi Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE), aplikasi e-sakip, hosting collocation melalui data center.

- 3) Program Pemeliharaan dan Pengendalian Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
Program ini bertujuan dalam pengembangan, pengendalian dan pemeliharaan infrastruktur jaringan teknologi informasi dan komunikasi (Tik) di Jawa Timur, antara lain pengendalian dan pendistribusian bandwidth oleh Dinas Kominfo Prov. Jatim, keterlibatan tim TIK Dinas Kominfo dalam penelitian anggaran APBD, PABBD, layanan TIK melalui *network operations center (NOC)*.
- 4) Program Pos dan Telekomunikasi.
Program ini bertujuan melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban serta evaluasi kegiatan pelayanan usaha jasa pos dan telekomunikasi khusus serta standarisasi alat peralatan pos dan telekomunikasi, antara lain pengawasan pengendalian jasa penyelenggara pos dalam rangka tertib administrasi dan tertib usaha penyelenggara pos, tertib penyelenggaraan menara telekomunikasi dan telekomunikasi khusus.
- 5) Program Peningkatan Desiminasi dan Informasi.
Program ini bertujuan untuk diseminasi informasi dalam rangka memberikan layanan informasi dan pengaduan masyarakat melalui kegiatan dialog interaktif “*Ajang Wadul*” di TVRI terkait pemerintahan dan pembangunan di Jawa Timur, antara lain Dialog interaktif melalui kegiatan Melek IT Gaul Informasi Luar Biasa (Mi-Gila) dalam pelayanan informasi berbasis TIK melalui call center 911, reportase atau liputan berita yang diupload melalui web jatimnewsroom.
- 6) Program Fasilitas Komisi Informasi Provinsi.

Program ini bertujuan untuk mengedukasi publik dan badan publik, mendorong terlaksananya layanan informasi yang berkualitas pada badan publik, peningkatan kinerja dan kualitas SDM Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), optimalisasi Komisi Informasi sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, antara lain forum informasi dan akuntabilitas, penilaian PPID kabupaten/kota, penanganan sengketa informasi melalui mediasi dan ajudikasi non litigasi.

7) Program Pengelolaan Jaringan Komunikasi.

Program ini bertujuan dalam rangka melaksanakan kebijakan kerjasama jaringan komunikasi antar lembaga komunikasi dan informasi dalam rangka pemberdayaan dan peran aktif masyarakat dalam penyebaran informasi, antara lain Lomba Cerdik Cermat Komunikatif (LCCK), forum bakohumas, ngopi bareng pak de karwo, festival pertunjukan rakyat (Pertura) dan pengelolaan issue aktual.,

Program Penunjang :

- 8) Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Program ini bertujuan untuk memberikan pelayanan administrasi kantor dalam mewujudkan tertib administrasi di lingkungan Dinas Kominfo Prov. Jatim.

- 9) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan dalam bidang penyediaan maupun pemeliharaan sarana dan prasarana yang diperlukan oleh Dinas Kominfo Prov. Jatim.

- 10) Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

Program ini bertujuan untuk mendukung kinerja dan etos kerja Dinas Kominfo Prov. Jatim.

- 11) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan di bidang teknologi informasi berbasis serat optic (*fiber optic*).

- 12) Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan.

Program ini bertujuan untuk

2.1.3 Rencana Kinerja Tahun 2015

Sasaran 1, dari Tujuan 1 :

Meningkatnya diseminasi informasi, dan keterbukaan informasi publik

Adapun target kinerja yang hendak dicapai tahun 2015 terkait sasaran satu dari tujuan satu adalah persentase penurunan pengaduan sebagai pelaksanaan diseminasi informasi yang ditargetkan pada tahun 2015 sebesar 12,1% dan persentase tindak lanjut sengketa informasi sebagai pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 91%.

Sasaran 2, dari Tujuan 1 :

Meningkatnya pemberdayaan masyarakat melalui jaringan komunikasi dan informatika

Adapun target kinerja yang hendak dicapai tahun 2015 terkait sasaran dua dari tujuan satu adalah persentase pemberdayaan masyarakat yang paham TIK ditargetkan sebesar 80%.

Sasaran 1, dari Tujuan 2 :

Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur TIK serta layanan publik.

Adapun target kinerja yang hendak dicapai tahun 2015 terkait sasaran satu dari tujuan dua adalah persentase pemanfaatan hosting dan collocation dilingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur yang ditargetkan sebesar 67% dan persentase SKPD, UPT, Lembaga Non Struktural dan Kab/Kota yang memiliki website sesuai standar muatan TIK yang ditargetkan sebesar 40% serta Penilaian Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGi) Tingkat Provinsi yang ditargetkan sebesar 2,92%.

Sasaran 2 dari Tujuan 2 :
Meningkatnya layanan penyelenggaraan pos dan telekomunikasi.

Adapun target kinerja yang hendak dicapai tahun 2015 terkait sasaran dua dari tujuan dua adalah persentase penyelenggaraan pos dan telekomunikasi yang ditargetkan sebesar 49%.

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2015

Perjanjian kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggung jawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumberdaya yang tersedia. Perjanjian kinerja ini menjabarkan target kinerja berupa nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Dengan demikian Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya.

**LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA 2015**

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TIMUR

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET 2015
1.	Meningkatnya diseminasi informasi, dan keterbukaan informasi publik	1.	Persentase penurunan pengaduan	12,1%
		2.	Persentase tindak lanjut sengketa informasi	91%
2.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat melalui jaringan komunikasi dan informatika	1.	Persentase pemberdayaan masyarakat yang paham TIK	80%
3.	Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur TIK serta layanan publik	1.	Persentase pemanfaatan hosting dan collocation	67%
		2.	Persentase SKPD, UPT, Lembaga Non Struktural dan Kab/Kota yang memiliki website sesuai standar muatan TIK	40%
		3.	Penilaian Pemingkatan e-Government Indonesia (PeGi) Tingkat Provinsi	2,92
4.	Meningkatnya layanan penyelenggaraan pos dan telekomunikasi	1.	Persentase penyelenggaraan pos dan telekomunikasi	49%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA DINAS KOMINFO PROV. JATIM

Sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja tahun 2015 memiliki fokus utama membahas tentang pencapaian hasil-hasil dari pelaksanaan program kerja di tahun 2015 berdasarkan masing-masing indikator kinerja dari sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur.

Agar mencapai hasil maka pengukuran kinerja ini digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program /kegiatan pada tahun 2015 sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur.

Adapun Tabel Pengukuran Kinerja disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pencapaian Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2015	Realisasi	% Capaian	
1	2	3	4	5	6	
1.	Meningkatnya diseminasi informasi, dan keterbukaan informasi publik	1.	Persentase penurunan pengaduan	12,10%	32,20%	266,12%
		2.	Persentase tindak lanjut sengketa informasi	91%	84,21%	92,54%
2.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat melalui jaringan komunikasi dan informatika	1.	Persentase pemberdayaan masyarakat yang paham TIK	80%	86,00%	107,50%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2015	Realisasi	% Capaian	
1	2	3	4	5	6	
3.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat melalui jaringan komunikasi dan informatika	1.	Persentase pemanfaatan hosting dan collocation	67%	76,00%	161,70%
		2.	Persentase SKPD, UPT, Lembaga Non Struktural dan Kab/Kota yang memiliki website sesuai standar muatan TIK	40%	61,86%	154,65%
		3.	Penilaian Pemingkatan e-Government Indonesia (PeGi) Tingkat Provinsi	2,92	3,01	103,08%
4.	Meningkatnya layanan penyelenggaraan pos dan telekomunikasi	1.	Persentase penyelenggaraan pos dan telekomunikasi	49%	67,29%	137,33%

Tabel 3.2
Perbandingan Realiasi Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2015	Realisasi		
				Th. 2014 (n-1)	Th. 2015 (n)	
1	2	3	4	5	6	
1.	Meningkatnya diseminasi informasi, dan keterbukaan informasi publik	1.	Persentase penurunan pengaduan	12,10%	4,70%	32,20%
		2.	Persentase tindak lanjut sengketa informasi	91%	89%	84,21%
2.	Meningkatnya pemberdayaan	1.	Persentase pemberdayaan	80%	81%	86,00%

	masyarakat melalui jaringan komunikasi dan informatika		masyarakat yang paham TIK			
--	--	--	---------------------------	--	--	--

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2015	Realisasi		
				Th. 2014 (n-1)	Th. 2015 (n)	
1	2	3	4	5	6	
3.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat melalui jaringan komunikasi dan informatika	1.	Persentase pemanfaatan hosting dan collocation	67%	60%	76,00%
		2.	Persentase SKPD, UPT, Lembaga Non Struktural dan Kab/Kota yang memiliki website sesuai standar muatan TIK	40%	35%	61,86%
		3.	Penilaian Pemingkatan e-Goverment Indonesia (PeGi) Tingkat Provinsi	2,92	2,89	3,01
4.	Meningkatnya layanan penyelenggaraan pos dan telekomunikasi	1.	Persentase penyelenggaraan pos dan telekomunikasi	49%	46,0%	67,29%

Tabel 3.3
Perbandingan Realiasi Kinerja s/d Akhir Periode RPJMD

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD (2019)	Realisasi	Tingkat Kemajuan	
1	2	3	4	5	6	
1.	Meningkatnya diseminasi informasi, dan keterbukaan informasi publik	1.	Persentase penurunan pengaduan	23,5%	32,20%	137,0%
		2.	Persentase tindak lanjut sengketa informasi	83%	84,21%	92,3%
2.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat melalui jaringan komunikasi dan informatika	1.	Persentase pemberdayaan masyarakat yang paham TIK	90%	86,00%	95,6%
3.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat melalui jaringan komunikasi dan informatika	1.	Persentase pemanfaatan hosting dan collocation	79%	76,00%	96,2%
		2.	Persentase SKPD, UPT, Lembaga Non Struktural dan Kab/Kota yang memiliki website sesuai standar muatan TIK	80%	61,86%	77,3%
		3.	Penilaian Pemingkatan e-Government Indonesia	3,04	3,01	99,0%

			(PeGi) Tingkat Provinsi			
--	--	--	----------------------------	--	--	--

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD (2019)	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
4.	Meningkatnya layanan penyelenggaraan pos dan telekomunikasi	1. Persentase penyelenggaraan pos dan telekomunikasi	71%	67,29%	91,9%

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2015	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya diseminasi informasi, dan keterbukaan informasi publik	1. Persentase penurunan pengaduan	32,20%		
		2. Persentase tindak lanjut sengketa informasi	84,21%		
2.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat melalui jaringan komunikasi dan informatika	1. Persentase pemberdayaan masyarakat yang paham TIK	86,00%		
3.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat melalui jaringan komunikasi dan informatika	1. Persentase pemanfaatan hosting dan collocation	76,00%		
		2. Persentase SKPD, UPT, Lembaga Non Struktural dan	61,86%		

			Kab/Kota yang memiliki website sesuai standar muatan TIK			
--	--	--	--	--	--	--

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Realisasi Tahun 2015	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
1	2	3		4	5	6
		3.	Penilaian Peningkatan e-Government Indonesia (PeGi) Tingkat Provinsi	3,01		
4.	Meningkatnya layanan penyelenggaraan pos dan telekomunikasi	1.	Persentase penyelenggaraan pos dan telekomunikasi	67,29%		

B. ANALISA CAPAIAN KINERJA DINAS KOMINFO PRO. JATIM TAHUN 2015

1. PERSENTASE PENURUNAN PENGADUAN

Penyebarluasan informasi/Diseminasi Informasi merupakan suatu hal yang penting dalam melaksanakan proses pembangunan di segala bidang. Sebagaimana Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 17/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota disebutkan bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota perlu menetapkan peraturan Menkominfo tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kab/Kota.

Diseminasi informasi adalah penyebaran informasi secara timbal balik dari Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kab/Kota kepada masyarakat baik diminta atau tidak diminta, yang dapat dilakukan melalui media massa maupun bentuk media komunikasi lainnya dan/atau lembaga-lembaga komunikasi masyarakat.

Seiring berjalannya waktu, keterbukaan informasi memberikan dampak besar terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Jawa Timur, sehingga penyebarluasan informasi harus lebih dioptimalkan. Adanya keterbukaan informasi tersebut, maka selama tahun 2015 telah diterima sejumlah 560 pengaduan yang diperoleh dari media elektronik melalui kegiatan “*Ajang Wadul*” yang diselenggarakan melalui televisi pada minggu I dan ke III setiap bulan.

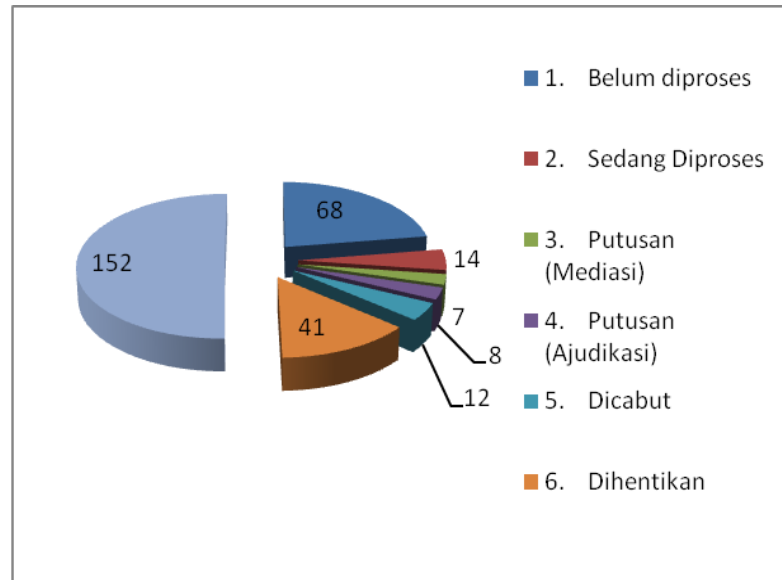
Perkembangan jumlah pengaduan masyarakat tahun 2012 sebanyak 969. Sedangkan tahun 2013 sebanyak 867 atau mengalami penurunan 3 %. Tahun 2014 jumlah pengaduan 826, menurun 4 % dari tahun 2013, dan tahun 2015 sebanyak 560. Ada selisih 266 pengaduan dari yang ditargetkan. Selisih tersebut menunjukkan jumlah lebih besar karena target di tahun 2015 terlalu tinggi, sedangkan realisasinya terjadi penurunan yang sangat signifikan.

Penurunan pengaduan masyarakat ini merupakan salah satu bukti bahwa sosialisasi atau penyebaran informasi terkait pembangunan dan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang dilakukan secara terus menerus dapat diterima dan dirasakan oleh masyarakat Jawa Timur, sehingga menjadikan masyarakat melek informasi. Dan ini juga merupakan bukti keberhasilan tindak lanjut program pemerintah dalam rangka mendukung 4 strategi pembangunan yakni *pro growth, pro poor, pro job dan pro environment*.

2. PERSENTASE TINDAK LANJUT SENGKETA INFORMASI

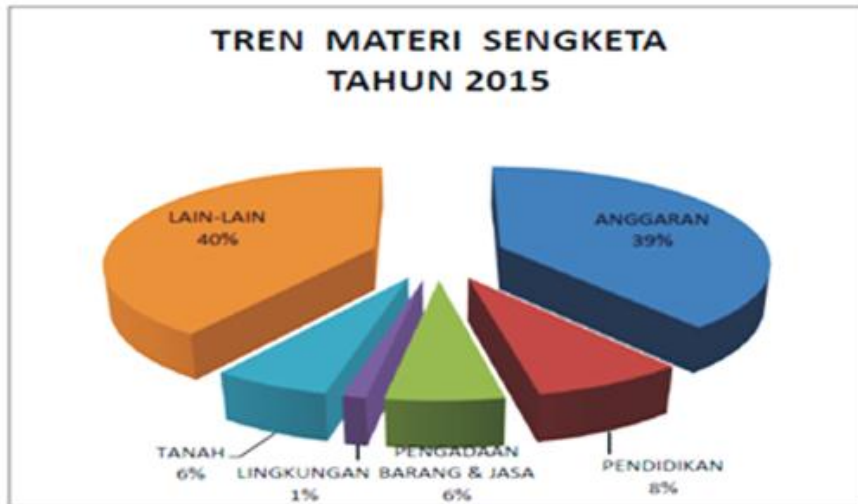
Pada tahun 2014, terkait dengan pengaduan/permohonan sengketa informasi, Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur menerima permohonan sengketa informasi sebanyak 161 kasus. Sedangkan penyelesaian kasus sengketa informasi selama tahun 2015 sebanyak 152 sehingga mengalami penurunan sebesar 4,79%. Dengan rincian kasus yang *belum diproses* 68,

kasus yang sedang di proses sebanyak 14, putusan (mediasi) sebanyak 7, kasus yang putusan (ajudikasi) sebanyak 8, kasus yang dicabut sebanyak 12, kasus yang dihentikan sebanyak 41 adapun rincian sengketa informasi dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Tren Materi Sengketa Tahun 2015

- Penanganan sengketa informasi pada tahun 2015 yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, dapat dikelompokkan beberapa jenis yaitu Anggaran (39%), Pendidikan (8%), Pengadaan Barang & Jasa (6%), Lingkungan (1%), Tanah (6%) dan Lain-lain (40%), dapat dilihat dalam grafik di bawah ini :



3. PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG PAHAM TIK

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang begitu pesat telah mengiringi proses perubahan tatanan dunia dari yang bersifat terbatas menjadi tanpa batas. Pesatnya informasi global kini tidak hanya menambah diwilayah perkotaan saja, tetapi telah sampai ke pelosok pedesaan dan telah merasuki semua lapisan masyarakat, baik pria / wanita, baik anak-anak maupun orang dewasa, sehingga mendorong terjadinya perubahan dalam kehidupan dan bahkan kesenjangan masyarakat.

Beberapa hal terjadinya kesenjangan tersebut antara lain keberagaman tingkat pendidikan masyarakat, budaya dan kondisi geografis dan ketersediaan infrastruktur. Kondisi demikian tentu menjadi tugas negara dalam hal ini pemerintah untuk memfasilitasinya dalam rangka mengurangi kesenjangan tersebut sehingga masyarakat mudah memperoleh informasi yakni melakukan pemberdayaan lembaga / kelompok-kelompok komunikasi masyarakat.

Untuk itu Bidang Pemberdayaan TIK Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, melalui Seksi Pemberdayaan TIK Masyarakat melakukan kegiatan-kegiatan yang meliputi antara lain :

I. Workshop TIK Bagi Masyarakat :

1. Maksud dilaksanakan Workshop TIK Masyarakat :
 - Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Masyarakat (TIK Masyarakat);
 - Untuk memberikan pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan kepada kelompok masyarakat tentang Teknologi, Informasi dan Komunikasi;
 - Memotivasi masyarakat agar lebih berdaya guna dan produktif.

2. Tujuan mempelajari Teknologi Informasi dan komunikasi adalah:
 - Menyadarkan kita akan potensi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terus berubah sehingga termotivasi untuk mengevaluasi dan mempelajari teknologi ini sebagai dasar untuk belajar secara terus menerus;

- Memotivasi kemampuan masyarakat agar bisa beradaptasi dan mengantisipasi perkembangan TIK, sehingga bisa melaksanakan dan menjalani aktifitas kehidupan sehari-hari secara mandiri dan lebih percaya diri;

Mengembangkan kemampuan belajar mandiri, berinisiatif, inovatif, kreatif dan bertanggung jawab dalam penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk pembelajaran, bekerja, dan pemecahan masalah sehari-hari

Untuk Tahun 2015 ini, Persentase pemberdayaan masyarakat yang paham TIK ditargetkan sebesar 80% dengan realisasi sebesar 107,5% dengan capaian realisasi sebesar 107,5%.

Dari anggaran tersebut dialokasikan untuk belanja langsung, belanja barang, dan belanja kegiatan workshop sebanyak 10 kali kegiatan. Namun demikian di tahun 2015 workshop dapat dilaksanakan sebanyak 14 (empat belas) kali dengan jumlah peserta sebanyak 347 orang, hal ini disebabkan karena bersamaan dengan adanya Pekan KIM se Jawa Timur yang pelaksanaannya di Kab. Nganjuk, dan peserta membludak melebihi target yang telah ditentukan.

Pemberdayaan masyarakat melalui TIK dengan diselenggarakannya workshop dengan bentuk kerjasama antara Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur dengan beberapa SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang mempunyai kelompok binaan yang ada di wilayah Kabupaten/ Kota di wilayah Jawa Timur atau lembaga lain yang mengajukan permohonan kegiatan workshop TIK antara lain.

- a. Persatuan Istri Pegawai PTPN X Jawa Timur;
- b. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Timur;
- c. Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur;
- d. TNI AL (Badan Penyalur) Jawa Timur
- e. Komunitas Pengelola Telecenter Jawa Timur Tahun 2015;
- f. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kab./ Kota se Jawa Timur.

4. PERSENTASE PEMANFAATAN HOSTING DAN COLLOCATION

Layanan web hosting merupakan layanan infrastruktur data center yang akan terus dikembangkan. Dengan terus berkembangnya berbagai website dan aplikasi berbasis web dari sisi jumlah maupun kualitas maka layanan web hosting sangat membantu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Mengingat pentingnya layanan web hosting yang sebagian besar berisi informasi publik dan aplikasi yang ada dalam website atau aplikasi masing-masing SKPD dibutuhkan manajemen layanan dan pengelolaan/ operasionalisasi server yang baik, sehingga harapan layanan web hosting akan berfungsi maksimal dan memberikan wujud manfaat lebih bagi klien – klien Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur. Saat ini Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur telah berhasil membangun layanan hosting dengan kualitas layanan profesional sebagaimana standar umum *Technical Requirment Hosting Server*.

Proses maintenance dan monitoring operasionalisasi layanan colocation server harus terus menerus dilakukan untuk menjamin reliabilitas dan performa layanan colocation Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur. Layanan colocation mengakomodasi kebutuhan colocation bagi Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menitipkan server-server aplikasi yang dimiliki agar bisa on-line selama 24 jam penuh.

Pada tahun 2014 hosting dan colocation sebanyak 212, sedangkan pada tahun 2015 sebanyak 378, pada tahun 2015 capaian hosting dan colocation telah melampaui yang ditargetkan yaitu 47%, dengan realisasinya 76% setelah terbangunnya data center dan sosialisasi serta pembinaan yang diberikan kepada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah memberikan dampak positif, sehingga fasilitas hosting dan collocation yang ada di Dinas Kominfo Prov. Jatim telah banyak digunakan oleh SKPD di lingkungan Pemprov. Jatim.

➤ **Kendala/permasalahan yang dihadapi :**

1. Belum optimalnya pembinaan dan sosialisasi kepada SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap manfaat hosting dan colocation, sehingga Dinas Kominfo tetap melaksanakan sosialisasi tersebut secara intensif.
2. Ketidakpercayaan SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan hosting dan colocation di Dinas Kominfo Prov. Jatim disebabkan karena jaminan keamanan informasi yang belum optimal. Terhadap hal ini, Dinas Kominfo melaksanakan kerjasama dengan Telkom guna memback up security informasi tersebut.
3. Perlunya pengembangan dan pemanfaatan data center yang lebih optimal.

➤ **Solusi/pemecahan masalah yang dihadapi :**

1. Melakukan pembinaan dan sosialisasi yang berkesinambungan kepada SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan hosting dan colocation.
2. Bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang melakukan hosting dan colocation di Dinas Kominfo Prov. Jatim tidak dipungut biaya/gratis.
3. Dengan menempatkan server dan aplikasinya di Dinas Kominfo Prov. Jatim akan terjaga keamanan data informasi karena dikelola secara langsung oleh Dinas Kominfo Prov. Jatim tanpa ada campur tangan pihak ketiga.
4. Pengembangan dan pemanfaatan Data Center di Dinas Kominfo Prov. Jatim pada tahun anggaran 2016.

5. PERSENTASE SKPD, UPT, LEMBAGA NON STRUKTURAL DAN KAB/KOTA YANG MEMILIKI WEBSITE SESUAI STANDAR MUATAN TIK

Kegiatan peningkatan pelayanan informasi kepada masyarakat melalui website www.jatimprov.go.id dan kominfo.jatimprov.go.id, maka diperlukan sistem informasi dan muatan teknologi informasi komunikasi.

Dalam rangka mewujudkan website SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang informatif dan sesuai dengan ketentuan nama domain, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan strategi nasional Pengembangan e-government.

Standarisasi website sebagaimana ketentuan diatas, antara lain meliputi :

1. Nama Domain

Nama domain website pemerintah harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara.

2. Konten (Informasi tentang profil ; Rencana Kerja, Laporan Kinerja; Produk Hukum; Pelayanan dan Informasi tentang Pengadaan Barang dan Jasa) .

Konten website pemerintah harus sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik

3. Fitur (Interaktif; Fasilitas Pencarian; Hyperlink dengan situs terkait; memanfaatkan Multi Media). Sesuai dengan Inpres Nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan strategi nasional Pengembangan *e government* tahapan pengembangan situs website pemerintah dilakukan melalui empat tahapan yaitu:

- a. Pembuatan situs informasi
- b. Pembuatan situs informasi yang interaktif
- c. Pembuatan situs transaksi pelayanan public
- d. Pembuatan aplikasi G2B,G2C dan G2B yang terintegrasi.

Pada tahun 2015 jumlah website SKPD yang memenuhi 75% standar kriteria website yang baik sejumlah 36 SKPD, sedangkan jumlah website kabupaten/kota yang memenuhi 75% standar kriteria website yang baik sejumlah 24 kabupaten/kota.

Kendala/permasalahan yang dihadapi :

1. Terbatasnya SDM Pengelola Website SKPD, kab/kota (belum ada staf khusus yang menangani /bertanggung jawab khusus yang menangani website .
2. Kelemahan Konten website SKPD , kab/ kota dalam hal informasi anggaran dan laporan keuangan serta informasi pelayanan.
3. Website SKPD Pemprov Jatim masih kurang memanfaatkan fitur-fitur interaktif, fasilitas pencarian, hypelink dan multi media.
4. Dalam hal fitur website Kab/kota sebagian besar sudah memanfaatkan fitur interaktif, fasilitas pencarian, hypelink dan multi media.

Solusi/pemecahan masalah yang dihadapi :

1. Mengadakan Rakor dengan pengelola website SKPD, kab/kota untuk meningkatkan kompetensi pengelola website dan untuk meningkatkan kualitas website.
2. Melakukan Redesain website ;
3. Melaksanakan FGD
4. Menyelenggarakan Bimtek /asistensi website .

6. PENILAIAN PEMERINGKATAN E-GOVERNMENT INDONESIA (PEGI) TINGKAT PROVINSI

Hasil asesmen keseluruhan dimensi untuk Provinsi Jawa Timur adalah BAIK. Penilaian ini dilakukan berdasarkan informasi yang di dapat dari hasil pemaparan peserta asesmen dan penggalian Asesor selama pelaksanaan asesmen. Disamping itu, penilaian ini juga mengacu pada indikator yang tersedia pada saat penilaian dilaksanakan. Berikut ini disajikan penilaian penerapan *e-government* pada Provinsi Jawa Timur berdasarkan masing-masing dimensi.

PeGI Tingkat Provinsi Tahun 2015

NO	PROVINSI	DIMENSI					NILAI RATA-RATA	KATEGORI
		KEBIJAKAN	KELEMBAGAAN	INFRASTRUKTUR	APLIKASI	PERENCANAAN		
1	Provinsi DKI Jakarta	3.50	3.40	3.37	3.57	3.13	3.39	BAIK
2	Provinsi Jawa Barat	2.80	3.07	3.20	3.13	3.13	3.07	BAIK
3	Provinsi Jawa Timur	3.27	3.20	3.20	2.80	2.57	3.01	BAIK
4	Provinsi Gorontalo	2.67	2.73	2.80	3.40	3.13	2.95	BAIK
5	Provinsi Bangka Belitung	2.50	3.00	3.20	2.79	3.00	2.90	BAIK
6	Provinsi D.I. Yogyakarta	2.90	2.50	2.50	2.80	2.60	2.66	BAIK
7	Provinsi Jawa Tengah	3.00	2.20	2.67	2.80	2.53	2.64	BAIK
8	Provinsi Bali	2.50	2.50	2.80	2.80	2.53	2.63	BAIK
9	Provinsi Sumatera Utara	2.67	2.87	2.53	2.50	2.53	2.62	BAIK
10	Provinsi Jambi	2.50	2.50	2.73	2.83	2.50	2.61	BAIK
11	Provinsi Nusa Tenggara Barat	2.60	2.50	2.40	2.57	2.63	2.54	BAIK
12	Provinsi Kalimantan Timur	2.80	2.70	2.80	2.50	1.80	2.52	BAIK
13	Provinsi Aceh	2.33	2.33	2.53	2.53	2.80	2.51	BAIK
14	Provinsi Sumatera Selatan	2.20	2.33	2.53	2.20	2.40	2.33	KURANG
15	Provinsi Sumatera Barat	2.07	1.93	2.13	2.13	1.80	2.01	KURANG
16	Provinsi Kalimantan Selatan	2.00	2.00	1.53	1.93	1.93	1.88	KURANG
17	Provinsi Lampung	1.93	1.53	1.73	1.87	1.73	1.76	KURANG
18	Provinsi Sulawesi Tengah	1.87	1.93	1.53	1.67	1.67	1.73	KURANG
19	Provinsi Sulawesi Barat	1.60	1.53	1.60	2.07	1.80	1.72	KURANG
20	Provinsi Bengkulu	1.56	1.75	1.40	1.47	1.43	1.54	KURANG
RATA-RATA		2.5	2.4	2.5	2.5	2.4	2.50	BAIK

Dinas Kominfo
Jatim

Saran dan tanggapan secara umum :

1. Perlu penguatan fungsi pengorganisasian perencanaan pengembangan TIK sehingga pengembangan TIK dapat diselaraskan.
2. Memperbaharui Rencana Induk Pengembangan TI dengan memperhatikan visi misi Pemerintahan Provinsi, arsitektur informasi dan bisnis proses yang dilaksanakan di Provinsi serta menetapkan Rencana Induk tersebut dengan Peraturan Gubernur sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengembangan TIK di Jawa Timur.

7. PERSENTASE PENYELENGGARAAN POS DAN TELEKOMUNIKASI

Sejalan dengan yang telah diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 83 Tahun 2008 pada Bagian Keenam yaitu tentang Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pos dan Telekomunikasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur yang dijabarkan dalam tugas Seksi Pengawasan dan Penertiban sebagai Pelaksana dan Pertanggungjawaban kegiatan Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban di Bidang Pos dan Telekomunikasi, menjadi aspek penting dalam mengawal kebijakan regulasi di Bidang Pos dan Telekomunikasi Wilayah Provinsi Jawa Timur. Kegiatan Penertiban yang

seyogyanya telah dapat dijalankan, sampai saat ini masih belum bisa dilaksanakan, hal ini disebabkan masih menunggu proses penyusunan Peraturan Daerah ataupun Peraturan Gubernur tersendiri yang mengatur tentang Pedoman, Petunjuk dan Pelaksanaan Pengawasan dan Penertiban Bidang Pos dan Telekomunikasi di Wilayah Jawa Timur sehingga Kegiatan Penertiban lebih diarahkan ke Fungsi Pembinaan dan mendukung Penyelenggara Usaha Jasa Pos dan Telekomunikasi.

Sampai saat ini capaian jumlah penyelenggaraan pos yang berijin dan tertib administrasi ditargetkan sebesar 49%, dengan pencapaian realisasi 67,29%% dengan tingkat capaian sebesar 137,3%.

Kendala/permasalahan yang dihadapi :

1. Kurangnya pemahaman Pengelola atau Pemilik usaha baik itu Penyelenggara Pos ataupun Menara Telekomunikasi tentang regulasi atau kebijakan yang mengatur terhadap perilaku usahanya serta kecilnya tingkat kesadaran Pengelola atau Pemilik usaha tersebut untuk menerapkan sesuai aturan yang berlaku untuk itu perlu dilaksanakan sosialisasi yang berkesinambungan tentang regulasi terkait hal-hal tersebut;
2. Belum diaturnya tupoksi yang jelas serta tumpang tindihnya kewenangan terkait bidang Pos dan Telekomunikasi di Pemerintah Kabupaten/Kota khususnya yang membidangi Komunikasi dan Informatika menjadikan pembinaan dan pengawasan menjadi tidak efektif, sehingga perlunya dilaksanakan sinkronisasi dan koordinasi yang lebih intensif dalam rangka penyamaan persepsi tentang tupoksi dan kewenangan khususnya bidang Pos dan Telekomunikasi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;

Solusi/pemecahan masalah yang dihadapi :

1. Dalam rangka menjalankan mekanisme atau prosedur kerja yang lebih tepat dan efektif perlu disusunnya kembali SOP (*Standard Operating Procedure*) yang baku dan lebih jelasterhadap seluruh kegiatan Bidang Pos dan Telekomunikasi;

2. Demi mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat khususnya Penyelenggara Pos dan Penyelenggara Penyiaran dalam tahapan proses permohonan Rekomendasi seyogyanya sudah harus dilakukan secara *online* melalui *website* ataupun dapat melalui *blog* di internet;
3. Pentingnya untuk segera membangun *Aplikasi Database* terkait Data Pos dan Telekomunikasi sebagai wujud efisiensi dan efektifitas kerja dalam rangka *collecting* dan *updating* Data Pos dan Telekomunikasi agar terintegrasi dengan baik.

C. REALIASI ANGGARAN

Tabel 3.5
ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Anggaran	% Anggaran
1	2	3		4	5
1.	Meningkatnya diseminasi informasi, dan keterbukaan informasi publik	1.	Persentase penurunan pengaduan	3.958.625.000	12,21%
		2.	Persentase tindak lanjut sengketa informasi	2.244.500.000	6,92%
2.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat melalui jaringan komunikasi dan informatika	1.	Persentase pemberdayaan masyarakat yang paham TIK	1.690.540.000	5,22%
3.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat melalui jaringan komunikasi dan informatika	1.	Persentase pemanfaatan hosting dan collocation	8.310.625.000	25,64%
		2.	Persentase SKPD, UPT, Lembaga Non Struktural dan Kab/Kota yang memiliki website sesuai standar muatan TIK	298.000.000	0,92%
		3.	Penilaian Pemingkatan e-Government Indonesia (PeGi) Tingkat Provinsi	577.835.000	1,78%

4.	Meningkatnya layanan penyelenggaraan pos dan telekomunikasi	1.	Persentase penyelenggaraan pos dan telekomunikasi	925.000.000	2,85%
----	---	----	---	-------------	-------

Tabel 3.6
PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN

Sasaran/ Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realiasi	Capaian	Alokasi	Realiasi	Capaian
Sasaran 1							
Meningkatnya diseminasi informasi, dan keterbukaan informasi publik	Persentase penurunan pengaduan	12,10%	32,20%	266,1%	3.958.625.000	3.934.854.597	99,40%
	Persentase tindak lanjut sengketa informasi	91%	84,21%	92,54%	2.244.500.000	2.174.057.765	96,86%
Program 1.1 Program Peningkatan Desiminasi dan Informasi							
Program 1.2 Program Fasilitasi Komisi Informasi Provinsi							
Sasaran 2							
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat melalui jaringan komunikasi dan informatika	Persentase pemberdayaan masyarakat yang paham TIK	80%	86,0%	107,5%	1.690.540.000	1.388.348.549	82,12%
Program 1.1 Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)							
Sasaran 3							
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Persentase pemanfaatan hosting dan	47%	76%	161,7%	8.310.625.000	8.198.165.012	94,13%

melalui jaringan komunikasi dan informatika	collocation						
---	-------------	--	--	--	--	--	--

Sasaran/ Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realiasi	Capaian	Alokasi	Realiasi	Capaian
	Persentase SKPD, UPT, Lembaga Non Struktural dan Kab/Kota yang memiliki website sesuai standar muatan TIK	40%	61,86%	154,7%	298.000.000	280.506.747	98,65%
	Penilaian Pemingkatan e-Government Indonesia (PeGi) Tingkat Provinsi	2,92	3,01	103,1%	577.835.000	546.285.991	94,54%
Program 1.1 Program Pengembangan Teknologi Informatika							
Program 1.2 Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)							
Sasaran 4							
Meningkatnya layanan penyelenggaraan pos dan telekomunikasi	Persentase penyelenggaraan pos dan telekomunikasi	49,0%	67,29%	137,33 %	925.000.000	900.164.348	97,32%
Program 1.1 Program Pos dan Telekomunikasi							

Tabel 3.7
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

No	Sasaran	Indikator Sasaran	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya diseminasi informasi, dan keterbukaan informasi publik	Persentase penurunan pengaduan	266,1%	99,39%	37,35%
		Persentase tindak lanjut sengketa informasi	92,54%	96,86%	104,67%
2.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat melalui jaringan komunikasi dan informatika	Persentase pemberdayaan masyarakat yang paham TIK	107,5%	78,12%	76,39%
3.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat melalui jaringan komunikasi dan informatika	Persentase pemanfaatan hosting dan collocation	161,7%	98,64%	61,01%
		Persentase SKPD, UPT, Lembaga Non Struktural dan Kab/Kota yang memiliki website sesuai standar muatan TIK	154,7%	94,12%	60,87%
		Penilaian Pemingkatan e-Government Indonesia (PeGi) Tingkat Provinsi	103,1%	94,54%	91,71%
4.	Meningkatnya layanan	Persentase penyelenggaraan	137,33%	97,31%	70,86%

penyelenggaraan pos dan telekomunikasi	pos dan telekomunikasi			
--	---------------------------	--	--	--

Tabel 3.8
REALISASI ANGGARAN
TAHUN 2015

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	
			Rp.	%
1	2	3	4	5
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	11.606.480.000,-	10.887.719.269	93,81%
	BELANJA LANGSUNG	32.412.650.000,-	31.301.987.854	96,57%
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6.446.860.000,-	6.370.652.571	98,82%
	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	6.446.860.000,-	6.370.652.571	98,82%
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.897.525.000,-	1.759.192.738	92,71%
	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	1.600.500.000,-	1.465.774.138	91,58%
	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	297.025.000,-	293.418.600	98,79%
3.	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	1.037.840.000,-	987.564.020	95,16%
	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	350.155.000,-	344.852.323	98,49%
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	687.685.000,-	642.711.697	93,46%
4.	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	1.290.800.000,-	1.202.719.538	93,18%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan	716.590.000,-	661.766.988	92,35%
	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran	150.000.000,-	125.505.150	83,67%
	Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data	424.210.000,-	415.447.400	97,93%
5.	Program Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	2.566.375.000,-	2.215.141.287	86,31%
	Penerapan Tata Kelola TIK Pemerintahan	577.835.000,-	546.285.991	94,54%
	Standarisasi Sistem Informasi dan Muatan TIK	298.000.000,-	280.506.747	94,13%
	Pemberdayaan Masyarakat Bidang TIK	298.890.000,-	162.047.550	72,69%
	Pendidikan Masyarakat Produktif melalui Pembangunan Telecenter	1.619.390.000,-	1.226.300.999	83,56%
6.	Program Pengembangan Teknologi Informatika	8.310.625.000,-	8.198.165.012	98,65%
	Fasilitasi Teknis Pengembangan Aplikasi TIK	473.843.000,-	460.505.100	97,19%

Pemerintahan			
Fasilitasi Pemanfaatan Data Center	7.430.630.000,-	7.333.087.162	98,69%
Fasilitasi Pemeliharaan Keamanan Sistem Informasi	406.152.000,-	404.572.750	99,61%

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	
			Rp.	%
1	2	3	4	5
7.	Program Pemeliharaan dan Pengendalian Infrastruktur Teknologi Informasi dan Telekomunikasi (TIK)	1.420.625.000,-	1.283.655.557	90,36%
	Pengembangan Infrastruktur Jaringan TIK	435.152.000,-	364.729.165	83,82%
	Fasilitasi Penyediaan dan Pengembangan Jaringan TIK	481.545.000,-	446.831.050	92,79%
	Pengendalian Bandwith dan Monitoring Jaringan TIK	208.645.000,-	190.942.484	91,52%
	Pemeliharaan Jaringan TIK dan Perangkat Keras	295.283.000,-	281.152.860	95,21%
8.	Program Pos dan Telekomunikasi	925.000.000,-	900.164.348	97,32%
	Pengendalian dan Pengawasan bidang Pos dan Telekomunikasi	468.052.500,-	465.267.798	99,41%
	Pembinaan Bidang Pos dan Filateli	200.282.500,-	187.427.600	93,58%
	Pembinaan Bidang Telekomunikasi	256.665.000,-	247.468.950	96,42%
9.	Program Peningkatan Desiminasi dan Informasi	3.958.625.000,-	3.934.854.597	99,40%
	Penyebarluasan Informasi melalui media	2.758.625.000	2.757.179.490	99,95%
	Optimalisasi Penangan Pengaduan Masyarakat	800.000.000,-	789.546.300	98,69%
	Fasilitasi Penguatan PPID	400.000.000,-	388.128.807	97,03%
10.	Program Fasilitasi Komisi Infomasi Provinsi	2.244.500.000,-	2.174.057.765	96,86%
	Penanganan Sengketa Informasi Publik	515.170.000,-	509.766.650	98,95%
	PPID Award SKPD/Kab/Kota se-Jatim	291.674.000,-	265.604.660	91,06%
	Fasilitasi Penguatan Keterbukaan Informasi Publik	1.323.920.000,-	1.290.057.955	97,44%
	Prosedur Layanan Informasi	63.236.000,-	59.695.000	94,40%
	Pelaksanaan Forum Informasi dan Akuntabilitas (FIA)	50.500.000,-	48.933.500	96,90%
11.	Program Pengelolaan Jaringan Komunikasi	2.313.875.000,-	2.275.820.421	98,36%
	Fasilitasi Issue Aktual	92.590.000,-	90.780.200	98,05%
	Pemberdayaan Lembaga Kehumasan Pemerintah/Bakohumas	260.540.000,-	245.797.250	94,34%
	Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Kelompok Informasi Masyarakat dan Media Tradisional	1.430.475.000,-	1.417.674.921	99,11%
	Fasilitasi Kemitraan Profesi Komunikasi dan Informasi	530.270.000,-	521.568.050	98,36%
	JUMLAH	44.019.130.000	42.189.719.269	95,84%

INOVASI

DINAS KOMINFO PROV. JATIM PADA TAHUN 2015

1. Assesment pemetaan TIK untuk master plan.
2. Implementasi Tata Naskah Dinas Elektronik di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur (seluruh SKPD).
3. Penamaan domain gratis bagi UKM se Jatim dengan domain co.id.
4. Pembangunan data center pemprov di Dinas Kominfo Prov. Jatim, tujuannya untuk eksadata (integrasi).
5. Mi-Gila inovasinya real time pelayanan TIK (langsung direspon oleh masyarakat).
6. Integrasi jaringan internet dan intranet seluruh SKPD di pemerintah prov. Jatim bertempat di Dinas Kominfo Prov. Jatim.
7. Layanan TIK melalui media sosial
8. Redesign website kominfo.jatimprov.go.id
9. Penyampaian informasi melalui video streaming
10. Assesment PPID pembantu pada SKPD Pemprov. Jatim
11. Pekan KIM bertempat di Nganjuk
12. Penunjukan Provinsi Jawa Timur sebagai tempat Rakornas Bakohumas
13. FGD Dinas Kominfo se Indonesia berkaitan dengan penataan kelembagaan Kominfo berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 oleh Menteri Kominfo RI
14. Pengembangan media informasi melalui media elektronik (bekerja sama dengan Bios Tv)
15. Kerjasama pengembangan TIK dengan provinsi Gyeongnam Korea Selatan pada tanggal 16 s/d 20 Mei 2015 di Gyeongnam Korea Selatan.

BAB IV P E N U T U P

4.1. TINJAUAN UMUM KEBERHASILAN

Keberhasilan Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Jatim dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya dalam pencapaian sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Jatim Tahun 2015 tercermin dari pencapaian sasaran strategis sesuai RPJMD dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Jatim Tahun 2014-2019.

Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKj IP) Dinas Kominfo Tahun 2015 juga memiliki peran sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance* dan dalam perspektif yang lebih luas. Selain itu, Laporan Kinerja juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur kepada masyarakat.

Sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka diharapkan pencapaian kinerja Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur tahun 2015 dengan kualitas pelaksanaan baik dari sebelumnya pada tahun 2014, sehingga perlu ditingkatkan kinerjanya untuk mencapai prestasi yang lebih baik hingga tahun-tahun berikutnya.

4.1.1. PERMASALAHAN YANG BERKAITAN DENGAN PENCAPAIAN KINERJA

Beberapa masalah yang masih menjadi perhatian bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur sebagaimana berikut :

1. Penyebarluasan informasi melalui media elektronik, media cetak, dan media luar ruang belum optimal.
2. Masih banyak masyarakat yang belum sadar terhadap pemanfaatan TIK/gagap teknologi; dan adanya kesenjangan dalam bidang komunikasi dan informatika antara masyarakat yang tinggal di kota dan perdesaan, khususnya wilayah miskin/blank spot teknologi informasi komunikasi (TIK);
3. Belum optimalnya SKPD yang memanfaatkan fasilitas hosting dan colocation di Dinas Kominfo Prov. Jatim sebagai penyedia layanan *hosting* dan *colocation*.

4.1.2. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Terhadap kondisi tersebut, strategi di masa mendatang yang perlu dikembangkan adalah :

1. Melakukan koordinasi dan meningkatkan kerjasama yang baik dengan media elektronik (radio dan televisi) dalam pelaksanaan penyebarluasan informasi melalui kegiatan dialog interaktif dan penerbitan/media cetak (surat kabar harian, tabloid, majalah, leaflet, brosur dll) serta media luar ruang (baliho, spanduk dan lain-lain).
2. Melakukan verifikasi, validasi data pengaduan, dan memfasilitasi jawaban ke SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur perihal pengaduan masyarakat.
3. Menyediakan layanan TIK dan pemberdayaan masyarakat tentang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) guna meminimalisasi masyarakat gagap teknologi melalui telecenter, workshop TIK, sosialisasi TIK di kabupaten/kota di Jawa Timur.
4. Memberikan secara kontinyu bimbingan teknis pengelolaan website terhadap SKPD di lingkungan Pemprov. Jatim dan update data/informasi pada website www.jatimprov.go.id dan kominfo.jatimprov.go.id.
5. Mengembangkan infrastruktur TIK melalui pengembangan aplikasi, muatan layanan publik, standardisasi dan pemanfaatan jaringan TIK dalam rangka peningkatan pelayanan publik serta menyiapkan rencana dasar hukum tentang pedoman penyelenggaraan teknologi informasi/Master Plan di lingkungan SKPD melalui Peraturan Gubernur Jawa Timur.
6. PPID Provinsi Jawa Timur akan memberikan pembinaan dan bimbingan teknis bagi PPID SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai penguatan PPID dan peningkatan pelayanan informasi publik guna meminimalisir timbulnya sengketa informasi.

4.2 SARAN DAN REKOMENDASI

4.2.1. Saran :

Dinas Kominfo Prov. Jatim sesuai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Komunikasi dan Informatika.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Komunikasi dan informatika yang mempunyai fungsi antara lain : Perumusan kebijakan teknis

dibidang Komunikasi dan Informatika; Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Komunikasi dan Informatika; pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; sangat diperlukan oleh masyarakat dan aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Mengingat program-program bidang Kominfo merupakan urusan wajib pemerintahan perlu mendapat alokasi anggaran yang proposional, sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana serta peningkatan kapasitas melalui pelatihan-pelatihan dll, untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik secara optimal.

4.2.2. Rekomendasi

Agar peran Dinas Kominfo Prov. Jatim dapat optimal dalam fungsinya sebagai penyebarluasan informasi baik melalui media yang bersifat konvensional/tradisional maupun secara on line dengan dukungan TIK, maka diperlukan rekomendasi antara lain :

1. Dinas Kominfo dapat menjadi rujukan/jujugan bagi SKPD kabupaten/kota
2. Diperlukan dukungan secara input yang meliputi anggaran yang memadai, jumlah sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana yang memadai.
3. Penyeragaman nomenklatur yang sama karena lembaga/instansi yang menangani bidang Kominfo di kabupaten/kota masih berstatus bagian untuk memudahkan koordinasi dalam rangka pembangunan dan pengembangan bidang Kominfo.
4. Mendorong SKPD di lingkungan Pemprov Jatim maupun di kabupaten/kota dalam rangka mewujudkan transparansi informasi di era keterbukaan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan, sehingga mendapatkan umpan balik guna peningkatan kinerja yang akuntabel bagi Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur pada periode mendatang.